



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

26. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 5), diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.513.211.682,00 bertambah sebesar Rp 8.588.426.876,00 sehingga menjadi Rp 16.101.638.558,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.570.061.682,00 bertambah sebesar Rp 8.588.426.876,00 sehingga menjadi Rp 11.158.488.558,00 terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat direncanakan sebesar Rp 1.024.682.682,00 berkurang sebesar (Rp 6.760.000,00) sehingga menjadi Rp 1.017.922.682,00;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp 8.595.186.876,00 sehingga menjadi Rp 8.595.186.876,00;
 - c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp 409.515.000,00;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp 1.060.864.000,00.

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.593.050.000,00 terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 690.000.000,00;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan direncanakan sebesar Rp 2.627.200.000,00;
 - d. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp 10.800.000,00;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00;
 - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direncanakan sebesar Rp 98.000.000,00;
 - k. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya direncanakan sebesar Rp 70.000.000,00; dan
 - l. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah direncanakan sebesar Rp 332.050.000,00.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 350.100.000,00 terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum direncanakan sebesar Rp 100.000,00; dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00."
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.147.821.641.046,00 bertambah sebesar Rp 49.939.284.934,00 sehingga menjadi Rp 1.197.760.925.980,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 682.009.310.658,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 431.551.365.866,00 bertambah sebesar Rp 42.912.839.934,00 sehingga menjadi Rp 474.464.205.800,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.049.664.522,00 bertambah sebesar Rp 7.026.445.000,00 sehingga menjadi Rp 33.076.109.522,00.

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.211.300.000,00.”
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 431.551.365.866,00 bertambah sebesar Rp 42.912.839.934,00 sehingga menjadi Rp 474.464.205.800,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 92.672.739.605,00 bertambah sebesar Rp 11.392.247.494,00 sehingga menjadi Rp 104.064.987.099,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 166.605.737.270,00 bertambah sebesar Rp 24.824.921.000,00 sehingga menjadi Rp 191.430.658.270,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.505.077.400,00 bertambah sebesar Rp 3.757.660.200,00 sehingga menjadi Rp 24.262.737.600,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 52.028.377.350,00 berkurang sebesar (Rp 21.208.607.840,00) sehingga menjadi Rp 30.819.769.510,00.
- (6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.809.487.000,00 bertambah sebesar Rp 3.258.891.000,00 sehingga menjadi Rp 7.068.378.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp 13.723.970.680,00, sehingga menjadi Rp 13.723.970.680,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp 7.163.757.400,00, sehingga menjadi Rp 7.163.757.400,00.
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 95.929.947.241,00.”

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.049.664.522,00 bertambah sebesar Rp 7.026.445.000,00 sehingga menjadi Rp 33.076.109.522,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - e. belanja hibah dana BOSP.
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00.
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.081.596.557,00 bertambah sebesar Rp 500.000.000,00 sehingga menjadi Rp 25.581.596.557,00.
 - (4) Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp 1.848.570.000,00, sehingga menjadi Rp 1.848.570.000,00.
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 908.067.965,00.
 - (6) Belanja Hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp 4.677.875.000,00, sehingga menjadi Rp 4.677.875.000,00.”
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 276.816.190.541,00 bertambah sebesar Rp 62.181.609.776,00 sehingga menjadi Rp 338.997.800.317,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.277.026.003,00 bertambah sebesar Rp 18.344.869.530,00 sehingga menjadi Rp 36.621.895.533,00.
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 173.507.032.428,00 bertambah sebesar Rp 23.177.280.378,00 sehingga menjadi Rp 196.684.312.806,00.
 - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.816.632.110,00 bertambah sebesar Rp 19.755.857.268,00 sehingga menjadi Rp 104.572.489.378,00.
 - (5) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.500.000,00 bertambah sebesar Rp 903.602.600,00 sehingga menjadi Rp 949.102.600,00.
 - (6) Belanja Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 170.000.000,00."
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.277.026.003,00 bertambah sebesar Rp 18.344.869.530,00 sehingga menjadi Rp 36.621.895.533,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.775.853,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.407.719.000,00.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.141.680,00.

- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.974.330.470,00 bertambah sebesar Rp 1.324.237.100,00 sehingga menjadi Rp 5.298.567.570,00.
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 69.625.000,00.
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 416.709.500,00 bertambah sebesar Rp 12.534.380.110,00 sehingga menjadi Rp 12.951.089.610,00.
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 bertambah sebesar Rp 100.674.000,00 sehingga menjadi Rp 120.674.000,00.
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.813.419.500,00 bertambah sebesar Rp 2.098.405.000,00 sehingga menjadi Rp 4.911.824.500,00.
 - (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 bertambah sebesar Rp 24.000.000,00 sehingga menjadi Rp 44.000.000,00.
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 22.500.000,00.
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 297.500.000,00.
 - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp 2.263.173.320,00, sehingga menjadi Rp 2.263.173.320,00.
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 6.189.305.000,00.”
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.507.032.428,00 bertambah sebesar Rp 23.177.280.378,00 sehingga menjadi Rp 196.684.312.806,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.000.132.428,00 bertambah sebesar Rp 22.829.380.378,00 sehingga menjadi Rp 193.829.512.806,00.
 - (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.106.900.000,00.
 - (4) Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp 347.900.000,00, sehingga menjadi Rp 347.900.000,00.
 - (5) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00."
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 84.816.632.110,00 bertambah sebesar Rp 19.755.857.268,00 sehingga menjadi Rp 104.572.489.378,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.413.865.768,00 bertambah sebesar Rp 14.883.110.668,00 sehingga menjadi Rp 86.296.976.436,00.
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.234.255.420,00 bertambah sebesar Rp 3.910.346.600,00 sehingga menjadi Rp 14.144.602.020,00.
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.018.510.922,00 bertambah sebesar Rp 962.400.000,00 sehingga menjadi Rp 3.980.910.922,00.
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00.
- (6) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 13.



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.427.191.653,00	184.427.191.653,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	42.391.152.822,00	42.391.152.822,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.238.000.000,00	11.238.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.258.061.000,00	14.258.061.000,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	14.258.061.000,00	14.258.061.000,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.495.091.822,00	13.495.091.822,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	13.495.091.822,00	13.495.091.822,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.513.211.682,00	16.101.638.558,00	8.588.426.876,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.570.061.682,00	11.158.488.558,00	8.588.426.876,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.024.682.682,00	1.017.922.682,00	-6.760.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	8.595.186.876,00	8.595.186.876,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	409.515.000,00	409.515.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	82.370.000,00	82.370.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	960.950.000,00	960.950.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	17.544.000,00	17.544.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.593.050.000,00	4.593.050.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.567.200.000,00	2.567.200.000,00	0,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	332.050.000,00	332.050.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	350.100.000,00	350.100.000,00	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.522.827.149,00	113.934.400.273,00	-8.588.426.876,00
4.1.04.05	Jasa Giro	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.215.409.831,00	2.215.409.831,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.215.409.831,00	2.215.409.831,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	109.807.417.318,00	101.218.990.442,00	-8.588.426.876,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	109.807.417.318,00	100.875.082.712,00	-8.932.334.606,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	52.676.774,00	52.676.774,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	108.170.000,00	108.170.000,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	0,00	183.060.956,00	183.060.956,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.263.752.393.000,00	1.375.873.287.710,00	112.120.894.710,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.152.517.393.000,00	1.264.638.287.710,00	112.120.894.710,00
4.2.01.05	Dana Desa	156.539.531.000,00	156.539.531.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	156.539.531.000,00	156.539.531.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	15.226.701.000,00	15.226.701.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0,00	15.226.701.000,00	15.226.701.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	456.117.543.000,00	457.912.123.000,00	1.794.580.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	11.715.269.000,00	11.715.269.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.269.403.000,00	8.978.499.000,00	-290.904.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	290.904.000,00	290.904.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	47.613.000,00	47.613.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	434.046.343.000,00	434.046.343.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	205.110.000,00	205.110.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	0,00	1.794.580.000,00	1.794.580.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	461.693.712.000,00	508.761.675.000,00	47.067.963.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	447.754.886.000,00	447.754.886.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.938.826.000,00	13.938.826.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	21.121.728.000,00	21.121.728.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	24.946.235.000,00	24.946.235.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78.166.607.000,00	126.198.257.710,00	48.031.650.710,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	0,00	5.852.393.710,00	5.852.393.710,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	15.988.420.000,00	15.988.420.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	932.500.000,00	932.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	72.231.930.000,00	72.231.930.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	484.000.000,00	484.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.450.677.000,00	5.450.677.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	5.890.017.000,00	5.890.017.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	400.660.000,00	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	513.000.000,00	513.000.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	3.942.149.000,00	3.942.149.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	0,00	1.545.520.000,00	1.545.520.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	5.137.363.000,00	5.137.363.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	7.540.082.000,00	7.540.082.000,00
4.2.01.09.02.0040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	184.546.000,00	184.546.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.235.000.000,00	111.235.000.000,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	111.235.000.000,00	111.235.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	77.875.000.000,00	77.875.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.448.179.584.653,00	1.560.300.479.363,00	112.120.894.710,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.147.821.641.046,00	1.197.760.925.980,00	49.939.284.934,00
5.1.01	Belanja Pegawai	682.009.310.658,00	682.009.310.658,00	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.621.843.476,00	398.747.593.476,00	-1.874.250.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	210.116.896.968,00	208.210.607.574,00	-1.906.289.394,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	77.553.856.310,00	77.553.856.310,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.360.252.996,00	17.360.252.996,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.272.389.749,00	8.272.389.749,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.904.938.098,00	5.051.681.998,00	146.743.900,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	30.651.975,00	30.651.975,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.412.153.454,00	16.297.409.554,00	-114.743.900,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	278.247.614,00	278.247.614,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.016.071.783,00	3.016.071.783,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.360.218.532,00	4.360.218.532,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.723.630.789,00	10.723.630.789,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.621.535.957,00	5.621.535.957,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.041.982.462,00	10.041.982.462,00	0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	939.811.444,00	939.811.444,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.532.326,00	5.564.326,00	32.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.311.339,00	2.318.733,00	7.394,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27.839.401.280,00	26.839.401.280,00	-1.000.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	741.960.400,00	741.960.400,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	254.307.077.789,00	256.181.327.789,00	1.874.250.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	134.442.648.780,00	134.442.648.780,00	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	23.418.178.709,00	23.418.178.709,00	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	4.207.191.100,00	4.207.191.100,00	0,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	963.308.900,00	963.308.900,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.944.389.562,00	4.944.389.562,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	152.537.300,00	152.537.300,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.357.161.550,00	6.357.161.550,00	0,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	47.849.917,00	47.849.917,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.297.500,00	1.297.500,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	38.060.000,00	38.060.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	486.043.500,00	486.043.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	816.885.500,00	816.885.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.475.741,00	9.475.741,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.892.500,00	3.892.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	45.412.500,00	45.412.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	29.093.324,00	29.093.324,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	78.177.726,00	78.177.726,00	0,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	519.000,00	519.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	467.100,00	467.100,00	0,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	216.250,00	216.250,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.137.500,00	15.137.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.238.500,00	4.238.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	648.750,00	648.750,00	0,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	18.244.580,00	18.244.580,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	72.231.930.000,00	72.231.930.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.450.677.000,00	5.450.677.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	484.000.000,00	2.358.250.000,00	1.874.250.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.719.761.975,00	15.719.761.975,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.789.712,00	671.789.712,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.413.567,00	91.413.567,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.284.800,00	104.284.800,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	115.164.000,00	115.164.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.513.300,00	87.513.300,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	315.000,00	315.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.257.936,00	49.257.936,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.382.040,00	1.382.040,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.146.120,00	4.146.120,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.860.000.000,00	4.860.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	378.227.418,00	378.227.418,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000,00	57.330.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	116.424.000,00	116.424.000,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.258.000,00	4.258.000,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.500,00	4.500,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00	150.000,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	405.000,00	405.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	202.500,00	202.500,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	64.875.000,00	64.875.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	85.981.500,00	85.981.500,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.478.873,00	1.478.873,00	0,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	607.500,00	607.500,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	7.087.500,00	7.087.500,00	0,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	81.000,00	81.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.362.500,00	2.362.500,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	101.250,00	101.250,00	0,00
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.201.148,00	12.201.148,00	0,00
5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.847.420,00	2.847.420,00	0,00
5.1.01.05.11.0039	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	72.900,00	72.900,00	0,00
5.1.01.05.11.0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	33.750,00	33.750,00	0,00
5.1.01.05.11.0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	661.500,00	661.500,00	0,00
5.1.01.05.11.0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.540.577,00	4.540.577,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.600.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	10.380.800.000,00	10.380.800.000,00	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	10.380.800.000,00	10.380.800.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.551.365.866,00	474.464.205.800,00	42.912.839.934,00
5.1.02.01	Belanja Barang	92.672.739.605,00	104.064.987.099,00	11.392.247.494,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.060.689.360,00	1.100.691.360,00	40.002.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	304.907.990,00	304.907.990,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.003.292.170,00	5.104.465.570,00	101.173.400,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	89.893.750,00	89.893.750,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	27.566.000,00	27.566.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	199.705.626,00	291.309.126,00	91.603.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	98.670.000,00	98.670.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	21.380.274,00	26.311.274,00	4.931.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	25.516.000,00	25.516.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	34.464.300,00	34.464.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	30.366.900,00	30.366.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	838.213.500,00	822.876.410,00	-15.337.090,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	993.989.400,00	1.169.657.300,00	175.667.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.474.252.446,00	4.278.056.228,00	-196.196.218,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	281.440.000,00	291.490.000,00	10.050.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.628.165.200,00	1.608.361.220,00	-19.803.980,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	940.912.390,00	941.637.222,00	724.832,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	81.956.962,00	81.956.962,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	126.040.000,00	149.477.500,00	23.437.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	280.750.000,00	285.565.000,00	4.815.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.804.316.345,00	2.420.315.195,00	615.998.850,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.492.045.222,00	4.579.203.522,00	3.087.158.300,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	377.577.920,00	2.384.632.120,00	2.007.054.200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.621.434.500,00	17.768.005.300,00	3.146.570.800,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	210.000.000,00	350.000.000,00	140.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.085.425.050,00	4.430.385.050,00	344.960.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	55.000,00	55.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.866.031.600,00	14.936.319.100,00	2.070.287.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.566.780.000,00	3.566.780.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	79.563.000,00	132.353.000,00	52.790.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.262.102.500,00	1.948.462.500,00	-313.640.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	423.000.000,00	423.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	677.180.000,00	677.180.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	354.950.000,00	357.750.000,00	2.800.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	80.700.000,00	80.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	759.620.000,00	764.120.000,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	196.922.500,00	199.922.500,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	230.420.700,00	230.420.700,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	166.605.737.270,00	191.430.658.270,00	24.824.921.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.923.400.000,00	7.604.050.000,00	1.680.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.946.710.000,00	4.097.345.000,00	-2.849.365.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	20.000.000,00	55.855.000,00	35.855.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	582.800.000,00	582.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	439.820.000,00	425.820.000,00	-14.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	754.800.000,00	754.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	20.128.700.000,00	20.208.800.000,00	80.100.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.268.500.000,00	4.369.861.600,00	1.101.361.600,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	38.480.200,00	156.780.200,00	118.300.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	741.100.000,00	741.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	365.875.000,00	365.875.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	547.900.000,00	547.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	845.800.000,00	845.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	293.600.000,00	293.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	59.700.000,00	572.700.000,00	513.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	129.000.000,00	179.500.000,00	50.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.696.550.000,00	8.505.950.000,00	809.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	527.500.000,00	527.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	400.225.000,00	510.225.000,00	110.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.972.360.000,00	3.062.360.000,00	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.485.800.000,00	10.754.700.000,00	1.268.900.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.499.600.000,00	5.450.100.000,00	-49.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	924.600.000,00	865.350.000,00	-59.250.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.000.000,00	74.250.000,00	2.250.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	234.500.000,00	249.500.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	412.650.000,00	580.150.000,00	167.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	193.800.000,00	207.300.000,00	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.842.600.000,00	3.058.000.000,00	215.400.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	89.150.000,00	89.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	44.178.500,00	216.539.300,00	172.360.800,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	438.584.000,00	682.298.000,00	243.714.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.894.500.000,00	1.921.000.000,00	26.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.906.593.228,00	2.046.227.828,00	139.634.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.873.045.092,00	12.149.010.692,00	275.965.600,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	514.417.250,00	514.417.250,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.326.755.700,00	3.430.685.700,00	103.930.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.848.000,00	7.548.000,00	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	335.987.000,00	335.987.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	284.125.000,00	284.125.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.312.540.000,00	8.312.540.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	924.940.000,00	1.000.220.000,00	75.280.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.075.040.000,00	2.075.040.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	39.501.000.000,00	41.820.205.000,00	2.319.205.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.492.280.000,00	3.504.480.000,00	1.012.200.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.268.800,00	180.268.800,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	121.176.000,00	121.176.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41.200.000,00	63.950.000,00	22.750.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	177.200.000,00	177.200.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	301.100.000,00	394.574.000,00	93.474.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	751.115.000,00	846.115.000,00	95.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	78.800.000,00	80.800.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	465.000.000,00	487.000.000,00	22.000.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	61.500.000,00	152.100.000,00	90.600.000,00
5.1.02.02.05.0063	Belanja Sewa Pagar	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	85.000.000,00	101.000.000,00	16.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	326.800.000,00	1.268.895.400,00	942.095.400,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	75.500.000,00	253.000.000,00	177.500.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	99.955.500,00	99.955.500,00	0,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	4.300.000.000,00	4.400.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	99.455.000,00	99.455.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.883.345.000,00	6.492.955.000,00	2.609.610.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.352.000.000,00	4.394.200.000,00	42.200.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	260.768.000,00	260.768.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.100.000,00	96.100.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.505.077.400,00	24.262.737.600,00	3.757.660.200,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	455.000.000,00	455.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.785.050.000,00	6.785.050.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	372.325.000,00	372.325.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	318.270.000,00	281.160.000,00	-37.110.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	161.920.000,00	161.920.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	400.430.000,00	402.180.000,00	1.750.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	68.350.000,00	74.600.000,00	6.250.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	217.050.000,00	219.050.000,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	45.150.000,00	45.150.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.509.650.000,00	1.509.650.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	9.809.482.400,00	13.139.252.600,00	3.329.770.200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.028.377.350,00	30.819.769.510,00	-21.208.607.840,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.620.979.000,00	23.682.925.160,00	-19.938.053.840,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	276.943.350,00	636.253.350,00	359.310.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.532.275.000,00	6.071.716.000,00	-1.460.559.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.500.000,00	89.250.000,00	80.750.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	589.680.000,00	339.625.000,00	-250.055.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.809.487.000,00	7.068.378.000,00	3.258.891.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.106.858.000,00	2.409.158.000,00	302.300.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	324.250.000,00	324.250.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	710.000.000,00	1.350.500.000,00	640.500.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	485.470.000,00	2.798.470.000,00	2.313.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	177.909.000,00	181.000.000,00	3.091.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	13.723.970.680,00	13.723.970.680,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	12.065.575.280,00	12.065.575.280,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0,00	857.500.000,00	857.500.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	305.415.400,00	305.415.400,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	390.480.000,00	390.480.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	7.163.757.400,00	7.163.757.400,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	7.163.757.400,00	7.163.757.400,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.929.947.241,00	95.929.947.241,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.929.947.241,00	95.929.947.241,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.049.664.522,00	33.076.109.522,00	7.026.445.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.081.596.557,00	25.581.596.557,00	500.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.656.641.117,00	11.656.641.117,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.530.000.000,00	6.030.000.000,00	500.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.989.165.000,00	1.989.165.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.805.790.440,00	5.805.790.440,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	1.848.570.000,00	1.848.570.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	1.259.520.000,00	1.259.520.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	589.050.000,00	589.050.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	908.067.965,00	908.067.965,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	908.067.965,00	908.067.965,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	4.677.875.000,00	4.677.875.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	3.576.125.000,00	3.576.125.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	1.101.750.000,00	1.101.750.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.211.300.000,00	8.211.300.000,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.008.800.000,00	5.008.800.000,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.304.000.000,00	4.304.000.000,00	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	704.800.000,00	704.800.000,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	0,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	0,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.642.500.000,00	1.642.500.000,00	0,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.642.500.000,00	1.642.500.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	276.816.190.541,00	338.997.800.317,00	62.181.609.776,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.277.026.003,00	36.621.895.533,00	18.344.869.530,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	26.775.853,00	26.775.853,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	20.775.853,00	20.775.853,00	0,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.407.719.000,00	4.407.719.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.351.754.000,00	3.351.754.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	708.067.000,00	708.067.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	273.200.000,00	273.200.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.698.000,00	74.698.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.141.680,00	19.141.680,00	0,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	17.641.680,00	17.641.680,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.974.330.470,00	5.298.567.570,00	1.324.237.100,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.724.426.020,00	1.879.626.020,00	155.200.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	614.698.750,00	1.312.714.750,00	698.016.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	654.000.000,00	746.611.100,00	92.611.100,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	767.913.200,00	785.623.200,00	17.710.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	12.800.000,00	14.300.000,00	1.500.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15.840.000,00	227.040.000,00	211.200.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	76.477.500,00	215.077.500,00	138.600.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	92.500.000,00	92.500.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.675.000,00	18.075.000,00	2.400.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	69.625.000,00	69.625.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	68.625.000,00	68.625.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	416.709.500,00	12.951.089.610,00	12.534.380.110,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	1.123.146.906,00	1.123.146.906,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	4.309.425.510,00	4.309.425.510,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	4.556.595.797,00	4.556.595.797,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	416.709.500,00	2.956.971.397,00	2.540.261.897,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.000.000,00	120.674.000,00	100.674.000,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	0,00	100.674.000,00	100.674.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.813.419.500,00	4.911.824.500,00	2.098.405.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.898.873.000,00	3.735.998.000,00	1.837.125.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	73.660.000,00	90.940.000,00	17.280.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	52.400.000,00	59.400.000,00	7.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	369.697.500,00	606.697.500,00	237.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	88.889.000,00	88.889.000,00	0,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	20.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	20.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	297.500.000,00	297.500.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	2.263.173.320,00	2.263.173.320,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00	2.074.274.720,00	2.074.274.720,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	60.608.600,00	60.608.600,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	53.290.000,00	53.290.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.189.305.000,00	6.189.305.000,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.189.305.000,00	6.189.305.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.507.032.428,00	196.684.312.806,00	23.177.280.378,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	171.000.132.428,00	193.829.512.806,00	22.829.380.378,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	33.683.046.400,00	39.637.313.100,00	5.954.266.700,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	119.841.142.278,00	125.557.138.278,00	5.715.996.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.312.608.400,00	4.837.468.400,00	524.860.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.137.207.500,00	13.119.722.900,00	7.982.515.400,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.776.955.750,00	6.039.763.050,00	262.807.300,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	525.830.200,00	525.830.200,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	297.411.100,00	297.411.100,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	199.350.000,00	199.350.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	1.400.353.000,00	1.400.353.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	995.851.000,00	995.851.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	514.410.000,00	777.161.778,00	262.751.778,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	242.150.000,00	242.150.000,00	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	2.106.900.000,00	2.106.900.000,00	0,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	2.106.900.000,00	2.106.900.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	347.900.000,00	347.900.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	347.900.000,00	347.900.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.816.632.110,00	104.572.489.378,00	19.755.857.268,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.413.865.768,00	86.296.976.436,00	14.883.110.668,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	30.200.000.000,00	37.294.580.000,00	7.094.580.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	17.767.500.000,00	24.162.720.668,00	6.395.220.668,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	8.026.920.500,00	8.620.230.500,00	593.310.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	14.819.445.268,00	15.419.445.268,00	600.000.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	400.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.234.255.420,00	14.144.602.020,00	3.910.346.600,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	3.396.056.200,00	4.857.758.800,00	1.461.702.600,00
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.2.04.02.02.0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	1.154.000.000,00	1.154.000.000,00	0,00
5.2.04.02.03.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	1.096.787.020,00	1.096.787.020,00	0,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.290.270.000,00	2.080.914.000,00	790.644.000,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	340.000.000,00	470.000.000,00	130.000.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.384.510.000,00	2.912.510.000,00	1.528.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.364.132.200,00	1.364.132.200,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.018.510.922,00	3.980.910.922,00	962.400.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	962.400.000,00	962.400.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	3.018.510.922,00	3.018.510.922,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.500.000,00	949.102.600,00	903.602.600,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.000.000,00	911.602.600,00	903.602.600,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	903.602.600,00	903.602.600,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	252.382.531.000,00	252.382.531.000,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.273.000.000,00	5.273.000.000,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.458.500.000,00	4.458.500.000,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.458.500.000,00	4.458.500.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	814.500.000,00	814.500.000,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	814.500.000,00	814.500.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	247.109.531.000,00	247.109.531.000,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	247.109.531.000,00	247.109.531.000,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	247.109.531.000,00	247.109.531.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.687.020.362.587,00	1.799.141.257.297,00	112.120.894.710,00
	Total Surplus/(Defisit)	-238.840.777.934,00	-238.840.777.934,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.840.777.934,00	238.840.777.934,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.840.777.934,00	238.840.777.934,00	0,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	2.060.482.000,00	2.060.482.000,00	0,00
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.060.482.000,00	2.060.482.000,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	91.828.922.934,00	91.828.922.934,00	0,00
6.1.01.02.01.0184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	91.828.922.934,00	91.828.922.934,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	144.951.373.000,00	144.951.373.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	93.715.276.000,00	93.715.276.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	36.236.097.000,00	36.236.097.000,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	238.840.777.934,00	238.840.777.934,00	0,00
	Pembiayaan Netto	238.840.777.934,00	238.840.777.934,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Hulu Sungai Utara, 26 Maret 2025

Bupati



H. SAHRUJANI